

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

LKj-PD



DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PROBOLONGGO

Jalan Lumajang Km. 5 Kedungasem Telp.(0335) 421542
disnaker@probolinggakab.go.id

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2025.

LKjPD disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo selama tahun 2025. Penyusunan laporan ini juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan LKjPD ini, kami berupaya menyajikan informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Laporan ini kami harapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo selama tahun 2025, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo selama tahun 2025.

Probolinggo, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

SANIWAR, S.Sos, M.Si

NIP. 19700323 199302 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2025.

LKjPD disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo selama tahun 2025. Penyusunan laporan ini juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan LKjPD ini, kami berupaya menyajikan informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Laporan ini kami harapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo selama tahun 2025, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo selama tahun 2025.

Probolinggo, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PROBOLINGGO



SANJIVAN S. Sos. M.Si

NIP. 19700323 199302 1 002

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iv
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	54
1.3. Landasan Hukum	54
1.4. Permasalahan Utama Berdasarkan Tusi.....	56
PERENCANAAN KINERJA.....	58
2.1. Perencanaan Strategis.....	58
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	60
2.3. Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	61
2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	66
AKUNTABILITAS KINERJA	68
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	68
3.2. Realisasi Anggaran	78
3.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025	79
3.4. Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya.....	87
3.5. Inovasi	90
3.6. Penghargaan	91
PENUTUP.....	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kualifikasi Kepegawaian Menurut Jabatan, Eselon Dan Kepangkatan

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai

Tabel 1.3 Kebutuhan Pegawai

Tabel 1.4 Aset Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo

Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja tahun 2025

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, Program, Kegiatan Dinas Tenaga Kerja tahun 2025

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.3 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 Renstra 2025-2029

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2025-2029

Tabel 3.5 Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.6 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Tabel 3.7 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Tabel 3.8 Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Unsur Sumber Daya Manusia merupakan modal yang sangat berharga dalam menunjang kegiatan pembangunan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan fokus utama untuk selalu dikembangkan sebagai sumber daya yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas tujuan yang optimal, maka perlu ditingkatkan pembinaan, pengembangan serta pelatihan secara teratur dan berkelanjutan sehingga dapat diperoleh tenaga kerja yang terampil, tangguh, berdisiplin tinggi serta mampu menjawab tantangan pembangunan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia meliputi bidang yang luas, mulai dari peningkatan produktivitas tenaga kerja, efisiensi, efektivitas kerja sampai pada perencanaan tenaga kerja, misalnya menyangkut tentang perluasan kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja serta mengatasi pengangguran. Telah menjadi gejala umum bahwa angkatan kerja atau lebih khusus disebut pencari kerja selalu akan bertambah lebih cepat dibanding dengan tingkat kesempatan kerja yang tersedia, Pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sering kali tidak terserap dalam kegiatan ekonomi yang direncanakan, baik pada sektor formal maupun informal, yang berarti akan terus menambah jumlah penganggur.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini diperlukan perencanaan, pembinaan / pengembangan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan-kebijakan memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Sebagai Laporan Kinerja Pemerintahan maka disusunlah buku **“Lkj Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025”**

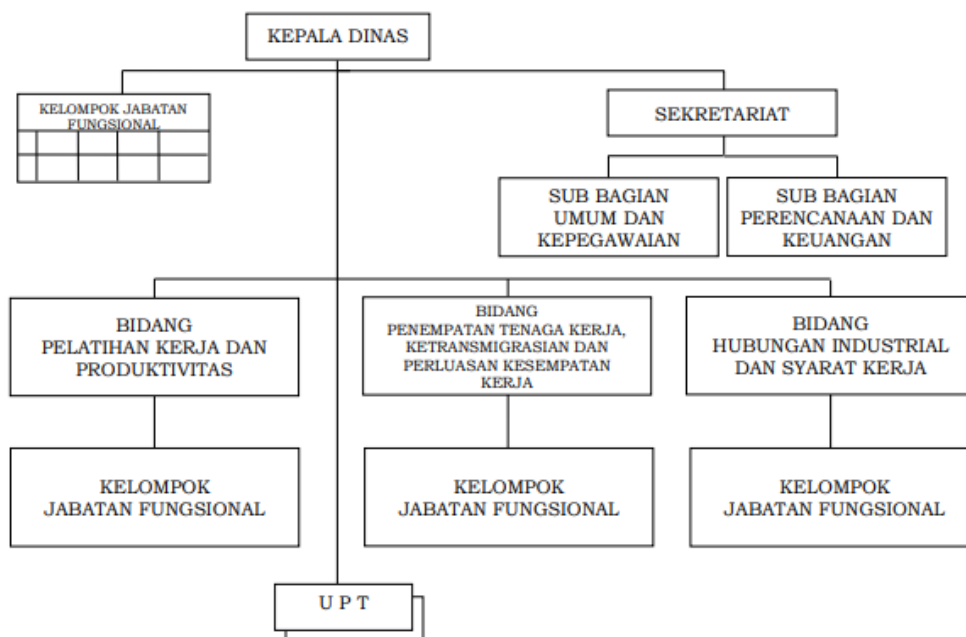
Dinas Tenaga kerja Kabupaten Probolinggo yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo.

Adapun pembahasan selanjutnya meliputi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), pengelolaan sumber daya manusia (SDM), serta pengelolaan dan optimalisasi aset, yang keseluruhannya memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan kinerja organisasi:

a. Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo



Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- pelaksanaan administrasi dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,

perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. Sekertariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 2) pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- 3) penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- 4) penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
- 5) penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;

- 6) penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- 7) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 2) penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 4) pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- 5) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- 6) penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan, Kelembagaan Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis kegiatan pelatihan

- kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
 - e. pelaksanaan administrasi pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1 Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melaksanakan kegiatan swadaya masyarakat yang meliputi :

- a. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;
- b. melaksanakan penyuluhan masyarakat;
- c. menyusun instrument evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
- d. menyusun rencana diseminasi panduan identitas kebutuhan pelatihan masyarakat;
- e. menyusun alat peraga / media pelatihan masyarakat;
- f. melaksanakan pelatihan masyarakat;
- g. menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat;
- h. mengolah data hasil pendampingan masyarakat;

3.2 Jabatan Fungsional Instruktur Ahli Muda

Tugas Jabatan Fungsional Instruktur Ahli Muda melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja. Tugas Instruktur Ahli Muda, meliputi:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas organisasi;
- b. menyusun program pelatihan pada level operator;
- c. menyusun program peningkatan produktivitas bagi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat;
- d. menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi atau lesson plan pada level teknis;
- e. menyusun modul pelatihan pada level operator;

- f. menyusun perangkat penilaian atau instrumen pada program pelatihan pada level operator;
- g. melatih dengan tatap muka pada level operator dan/atau calon Instruktur;
- h. memperbaiki peralatan pelatihan;
- i. melakukan pendampingan pada perusahaan menengah;
- j. melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah;
- k. menyusun perangkat evaluasi hasil pembelajaran pada level teknisi;
- l. melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan atasan.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketrasmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketrasmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan ketrasmigrasian, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketrasmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketrasmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
- b. pelaksanaan fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketrasmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketrasmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
- d. pelaksanaan administrasi fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketrasmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1 Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda

Tugas Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda melakukan kegiatan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan. Meliputi :

- a. menganalisis informasi pasar kerja;

- b. melakukan bimbingan jabatan kepada tenaga kerja pernah bekerja atau ter PHK atau disabilitas atau lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan;
- c. melakukan pemantauan operasional lembaga penempatan / bursa kerja raya.

4.2 Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda

Tugas Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda melakukan kegiatan pelayanan antar kerja. Meliputi :

- a. melakukan seleksi administrasi pencari kerja untuk penempatan;
- b. melakukan pembekalan kepada tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja;
- c. menganalisis dokumen perjanjian penempatan / perjanjian;
- d. melakukan pemantauan penempatan tenaga kerja;
- e. melakukan penyelesaian masalah selama penempatan tenaga kerja dalam / luar negeri;
- f. melakukan pendampingan pemulangan tenaga kerja;
- g. mendampingi peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja;
- h. melakukan validasi dan analisis permohonan Pengesahan RPTKA/pencabutan Pengesahan RPTKA/perubahan Pengesahan RPTKA;
- i. menganalisis hasil pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing.

4.3 Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melaksanakan kegiatan swadaya masyarakat yang meliputi :

- a. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;
- b. melaksanakan penyuluhan masyarakat;
- c. menyusun instrument evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
- d. menyusun rencana diseminasi panduan identitas kebutuhan pelatihan masyarakat;
- e. menyusun alat peraga / media pelatihan masyarakat;
- f. melaksanakan pelatihan masyarakat;
- g. menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat;
- h. mengolah data hasil pendampingan masyarakat;
- i. menyusun instrument evaluasi penyelenggaraan pendampingan

- masyarakat;
- j. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pengorganisasian masyarakat;
- k. mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitas pengorganisasian masyarakat.

4.4 Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama

Tugas Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama melakukan kegiatan pelayanan antar kerja. Meliputi :

- a. mengidentifikasi ketersediaan informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja;
- b. menyusun statistik informasi pasar kerja;
- c. melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja;
- d. melakukan layanan pendaftaran pencari kerja;
- e. melakukan bimbingan jabatan kepada pencari kerja yang baru masuk ke pasar kerja;
- f. menganalisis permohonan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
- g. menganalisis kelayakan dokumen pengajuan paspor calon Pekerja Migran Indonesia;
- h. memverifikasi dokumen permohonan pengajuan penggunaan TKA;
- i. melakukan kompilasi data yang akan diserahkan kepada stakeholder/pemangku kepentingan untuk tindak lanjut hasil pemantauan penggunaan TKA;

5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bina hubungan industrial, kesejahteraan dan pengupahan dan persyaratan kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan hubungan

industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;

- d. pelaksanaan administrasi kegiatan pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5.1 Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Muda

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Muda melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan. Meliputi :

- a. menyusun rencana kerja pembinaan norma ketenagakerjaan teknis;
- b. melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan teknis;
- c. melakukan pemeriksaan ulang dan/atau khusus terhadap penerapan norma ketenagakerjaan;
- d. melakukan kegiatan pengusulan penetapan UMK;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepatuhan ketenagakerjaan diperusahaan;
- f. melakukan fasilitasi pelayanan persyaratan kerja dan company profile.

5.2 Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Tugas Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meliputi:

- 1. Melakukan pembinaan hubungan industrial
 - a. melakukan penilaian hubungan industrial diperusahaan;
 - b. menyusun peta hubungan industrial;
 - c. menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring sarana hubungan industrial diperusahaan;
 - d. menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring mekanisme pencegahan perselisihan hubungan industrial, penanganan mogok kerja diperusahaan;
 - e. menyusun rencana pembinaan, bimbingan penyuluhan dan monitoring mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - f. mengidentifikasi pemutusan hubungan kerja dan pelaporan pemutusan hubungan kerja;
 - g. mengidentifikasi unjuk rasa terkait ketenagakerjaan;

- h. melakukan Layanan audiensi masyarakat/pekerja.
- 2. Melakukan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - a. melakukan klarifikasi dan fasilitasi;
 - b. melakukan mediasi;
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian bersama/anjuran;
 - d. melakukan monitoring hasil penyelesaian perselisihan hi melalui perundingan bipartit.

5.3 Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Tugas Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meliputi:

- 1. Penyelenggaraan Layanan Hubungan Industrial
 - a. melakukan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Buruh;
 - b. melakukan Verifikasi Perjanjian Kerja (PKWT);
 - c. melakukan Verifikasi Peraturan Perusahaan;
 - d. melakukan Verifikasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - e. melakukan Verifikasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan;
 - f. melakukan Verifikasi Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh;
 - g. melakukan Verifikasi Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit;
 - h. melakukan Layanan Konsultasi di bidang hubungan industrial.
- 2. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan Hubungan Industrial
 - a. melakukan penyuluhan/sosialisasi sarana hubungan industrial diperusahaan;
 - b. melakukan bimbingan penyusunan materi perjanjian kerja;
 - c. melakukan bimbingan penyusunan materi peraturan perusahaan;
 - d. melakukan bimbingan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. melakukan monitoring syarat kerja di perusahaan.
- 3. Melakukan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - a. melakukan klarifikasi dan fasilitasi;
 - b. melakukan mediasi;
 - c. merumuskan kesepakatan mediasi perselisihan hi dalam bentuk perjanjian Bersama;
 - d. merumuskan kesepakatan mediasi perselisihan hi dalam bentuk anjuran;

- e. melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian bersama/anjuran;
- f. melakukan monitoring hasil penyelesaian perselisihan hi melalui perundingan bipartit.

5.4 Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Tugas Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meliputi:

1. Penyelenggaraan Layanan Hubungan Industrial
 - a. melakukan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Buruh;
 - b. melakukan Verifikasi Perjanjian Kerja (PKWT);
 - c. melakukan Verifikasi Peraturan Perusahaan;
 - d. melakukan Verifikasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - e. melakukan Verifikasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan;
 - f. melakukan Verifikasi Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh;
 - g. melakukan Verifikasi Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit;
 - h. melakukan Layanan Konsultasi di bidang hubungan industrial.
2. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan Hubungan Industrial
 - a. melakukan penyuluhan/sosialisasi sarana hubungan industrial diperusahaan;
 - b. melakukan bimbingan penyusunan materi perjanjian kerja;
 - c. melakukan bimbingan penyusunan materi peraturan perusahaan;
 - d. melakukan bimbingan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. Melakukan monitoring syarat kerja di perusahaan.
3. Melakukan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - a. melakukan klarifikasi dan fasilitasi;
 - b. melakukan mediasi;
 - c. merumuskan kesepakatan mediasi perselisihan hi dalam bentuk perjanjian Bersama;
 - d. merumuskan kesepakatan mediasi perselisihan hi dalam bentuk anjuran;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian bersama/anjuran;
 - f. melakukan monitoring hasil penyelesaian perselisihan hi melalui perundingan bipartit.

6. UPT

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT BLK. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan penyiapan dan penyediaan sarana serta prasarana pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap berbagai jenis keterampilan;
- f. pelaksanaan kegiatan uji keterampilan, kompetensi dan sertifikasi peserta pelatihan tenaga kerja;
- g. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi tentang penyelenggaraan Balai Latihan Kerja;
- h. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi calon tenaga kerja;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kerja;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- b. Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja (Status, Jabatan dan Pendidikan).

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketransmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo sebanyak 49 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 1.1
Kualifikasi Kepegawaian Menurut Jabatan, Eselon Dan Kepangkatan

N O	Jabatan	Esel on	Pangkat/Golongan (Ruang)														P3K PW
			IV	IV	IV	III	III	III	III	II	II	II	II	I	I		
			C	b	a	D	c	B	A	d	C	B	a	d	c	IX	
1.	Kepala Dinas	IIb	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	IIIa	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kepala Bidang	IIIb	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kasi/ subag	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Fungsional	-	-	-	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
7.	Staf Pelaksana	-	-	-	-	2	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	18
	Jumlah	49	1	1	7	7	6	1	1	2	1	-	-	-	-	4	18

Status kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun

2025 terdiri atas:

PNS : 27 orang

PPPK : 4 orang

PPPK Paruh waktu : 18 orang

Sedangkan jumlah pegawai menurut tingkat kepangkatan yang ada adalah sebagai berikut:

Golongan/ ruang IV : 9 orang

Golongan/ ruang III : 15 orang

Golongan/ ruang II : 3 orang

PPPK : 4 orang

PPPK Paruh Waktu : 18 orang

Sedangkan jika dilihat dari klasifikasi Gender maka dari 49 pegawai terdapat 16 orang pegawai yang berjenis kelamin Perempuan dan 33 orang pegawai berjenis kelamin Laki-Laki.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja sebanyak 49 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai

No	Keterangan	Pendidikan								TOTAL
		SD	SLTP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1.	Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan UPT BLK Kabupaten Probolinggo	1	-	10	-	-	2	24	12	49

Berdasarkan data tingkat pendidikan, jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan UPT BLK Kabupaten Probolinggo sebanyak 49 orang. Pegawai tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, terdiri atas 1 orang berpendidikan SD, 10 orang berpendidikan SMA, dan 2 orang berpendidikan Diploma III (D3). Sementara itu, pegawai dengan pendidikan tinggi didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 24 orang dan Strata 2 (S2) sebanyak 12 orang. Dengan komposisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan UPT BLK Kabupaten Probolinggo.

Kebutuhan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo berdasarkan analisis beban kerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 1.3
Kebutuhan Pegawai

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Kesenjangan +/-
1	2	4	5	6
	Jumlah Seluruhnya	49	119	-70
	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PROBOLINGGO			
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kasubag Umum dan kepegawaian	1	1	0
4	JF Pranata SDM Aparatur Penyelia	0	1	-1

5	JF Pranata SDM Aparatur Mahir	0	1	-1
6	JF Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	-1
7	JF Arsiparis Penyelia	0	1	-1
8	JF Aripatis Mahir / Pelaksana Lanjutan	0	1	-1
9	JF Aripatis Terampil / Pelaksana	0	1	-1
10	JF Pranata Komputer Penyelia	0	1	-1
11	JF Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
12	JF Pranata Komputer Terampil	0	1	-1
13	Penata Layanan Operasional	4	2	2
14	Pengelola Layanan Operasional	0	4	-4
15	Pengadministrasian Perkantoran	3	4	-1
16	Operator Layanan Operasional	1	0	1
	Kasubag Perencana dan Keuangan	1	1	0
17	JF Perencana Muda	0	1	-1
18	JF Perencana Pertama	1	1	0
19	Penata Layanan Operasional	2	6	-4
20	Pengelola Layanan Operasional	1	2	-1
21	Penelaah Teknis Kebijakan	1	3	-2
22	Pengadministrasian Perkantoran	1	2	-1
	Kabid Pelatihan Kerja dan Produktivitas	1	1	0
23	JF Instruktur Muda	1	2	-1
24	JF Instruktur Pertama	1	3	-2
25	JF Instruktur Penyelia	0	3	-3
26	JF Instuktur Mahir	0	3	-3
27	JF Instruktur Terampil	0	3	-3
28	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	0	2	-2
29	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	0	2	-2
30	Penelaah Teknis Kebijakan	0	3	-3
31	Pengolah Data dan Informasi	1	5	-4
32	Operator Layanan Operasional	1	2	-1
33	Penata Layanan Operasional	2	0	2
	Kabid Penempatan Tenaga Kerja Ketransmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja	1	1	0
34	JF Pengantar Kerja Muda	2	3	-1
35	JF Pengantar Kerja Pertama	0	5	-5
36	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	1	2	-1

37	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	0	2	-2
38	Penelaah Teknis Kebijakan	0	4	-4
39	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
40	Operator Layanan Operasional	1	1	0
41	Pengajar Kerja Ahli Pertama	2	0	2
42	Penata Layanan Operasional	1	0	1
	Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	1	1	0
43	JF Pengawas Ketenagakerjaan Muda	1	2	-1
44	JF Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	0	3	-3
45	JF Mediator Hubungan Industrial Muda	3	3	0
46	JF Mediator Hubungan Industrial Pertama	0	1	-1
47	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
48	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
49	Pemeriksa Industri	1	0	1
50	Penata Layanan Operasional	1	0	1
	Kepala UPT BLK	1	1	0
51	JF Instruktur Muda	2	2	0
52	JF Instruktur Pertama	0	2	-2
53	JF Instruktur Penyelia	0	2	-2
54	JF Instruktur Mahir	0	2	-2
55	JF Instruktur Terampil	0	2	-2
56	Penata Layanan Operasional	1	1	0
57	Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
58	Operator Layanan Operasional	4	5	-1
59	Pengelola Umum Operasional	1	1	0

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 49 orang, sementara kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) adalah sebanyak 119 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak 70 orang.

Secara umum, beberapa jabatan struktural seperti Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, serta Kepala UPT BLK telah terisi sesuai kebutuhan. Namun, masih terdapat kekurangan yang cukup signifikan pada berbagai Jabatan Fungsional (JF), terutama JF Pranata SDM Aparatur, JF Arsiparis, JF Pranata Komputer, JF Instruktur, JF Pengantar Kerja, JF Pengawas Ketenagakerjaan, serta beberapa jabatan teknis lainnya.

Di sisi lain, terdapat beberapa jabatan yang mengalami kelebihan

pegawai, seperti Penata Layanan Operasional, Operator Layanan Operasional, serta beberapa jabatan tertentu di masing-masing bidang. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan dan pemenuhan kebutuhan pegawai secara bertahap agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan beban kerja yang ada.

c. Aset Dinas Tenaga Kerja

Tabel 1.4
Aset Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo

Penggolongan dan Kodefikasi Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan Rp.	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
TANAH			3.345.246.400,00				
TANAH			3.345.246.400,00				
TANAH PERSIL			3.345.246.400,00				
TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA			3.345.246.400,00				
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6600	m2	1.738.000.000,00	Pengadaan APBD	18/01/1987	Dinas Tenaga Kerja	Kantor Tenaga Kerja Kab. Prob
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10170	m2	1.607.246.400,00	Pengadaan APBD	16/10/2019	Dinas Tenaga Kerja	BLK Dinas Tenaga Kerja
PERALATAN DAN MESIN	1.354,00		5.662.077.364,98				
ALAT BESAR	12,00		35.303.500,00				
ALAT BANTU	12,00		35.303.500,00				
ELECTRIC GENERATING SET	3,00		27.203.500,00				
Portable Generating Set	1,00	Unit	6.682.500,00	Pengadaan APBD	19/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
Portable Generating Set	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
MESIN BOR	9,00		8.100.000,00				
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	ALAT BANTU
ALAT ANGKUTAN	19,00		1.531.031.507,00				
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	19,00		1.531.031.507,00				
KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	6,00		1.197.329.500,00				
Station Wagon	1,00	Unit	75.000.000,00	Pengadaan APBD	01/12/1995	Dinas Tenaga Kerja	

Station Wagon	1,00	Unit	85.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	
Station Wagon	1,00	Unit	254.350.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
Station Wagon	1,00	Unit	213.500.000,00	Pengadaan APBD	24/07/2017	Dinas Tenaga Kerja	
Sport Utility Vehicle (SUV)	1,00	Unit	406.579.500,00	Pengadaan APBD	25/05/2015	Dinas Tenaga Kerja	
Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00	Unit	162.900.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	Dinas Tenaga Kerja	DITERIMA DARI KECAMATAN TIRIS
KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1,00		122.102.007,00				
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1,00	Unit	122.102.007,00	Pengadaan APBD	01/04/2016	Dinas Tenaga Kerja	
KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1,00		79.981.000,00				
Pick Up	1,00	Unit	79.981.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2004	Dinas Tenaga Kerja	
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	11,00		131.619.000,00				
Sepeda Motor	1,00	Unit	6.800.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1997	Dinas Tenaga Kerja	
Sepeda Motor	1,00	Unit	7.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1997	Dinas Tenaga Kerja	
Sepeda Motor	1,00	Unit	7.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1997	Dinas Tenaga Kerja	
Sepeda Motor	1,00	Unit	11.275.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Sepeda Motor	1,00	Unit	11.275.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Sepeda Motor	1,00	Unit	13.600.000,00	Pengadaan APBD	30/12/2010	Dinas Tenaga Kerja	
Sepeda Motor	1,00	Unit	13.700.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010	Dinas Tenaga Kerja	
Sepeda Motor	1,00	Unit	15.180.000,00	Pengadaan APBD	29/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Sepeda Motor	1,00	Unit	15.180.000,00	Pengadaan APBD	29/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Sepeda Motor	1,00	Unit	15.104.500,00	Pengadaan APBD	25/09/2014	Dinas Tenaga Kerja	
Sepeda Motor	1,00	Unit	15.104.500,00	Pengadaan APBD	25/09/2014	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	270,00		1.209.677.000,00				
ALAT BENGKEL BERMESIN	156,00		676.115.000,00				
PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	6,00		45.495.000,00				
Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1,00	Unit	20.000.000,00	Pengadaan APBD	12/11/2004	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)
Mesin Bor	1,00	Unit	8.050.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Bor
Mesin Gerinda	1,00	Unit	1.010.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Gerinda
Mesin Gerinda	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Gerinda
Mesin Gerinda	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Gerinda
Mesin Pemotong Plat	1,00	Unit	10.435.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Pemotong Plat
PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10,00		23.000.000,00				
Mesin Gerinda Tangan	1,00	Unit	1.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Gerinda Tangan
Mesin Gerinda Tangan	1,00	Unit	1.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Gerinda Tangan
Mesin Gerinda Tangan	1,00	Unit	1.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Gerinda Tangan
Mesin Gerinda Tangan	1,00	Unit	1.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Gerinda Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Bor Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Bor Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	3.350.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Bor Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	3.350.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Bor Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	3.350.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Bor Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	3.350.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Bor Tangan

PERALATAN TUKANG BESI	6,00		6.600.000,00				
Gunting Plat Tangan	1,00	Unit	1.800.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	Gunting Plat Tangan
Gunting Plat Tangan	1,00	Unit	1.800.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	Gunting Plat Tangan
Kunci Pas	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Kunci Pas
Kunci Pas	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Kunci Pas
Kunci Pas	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Kunci Pas
Kunci Pas	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Kunci Pas
PERALATAN TUKANG KAYU	1,00		1.500.000,00				
Peralatan Tukang Kayu Lain-Lain	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	peralatan tukang kayu lainnya (dst)
ALAT UKUR	24,00		388.852.000,00				
ALAT KALIBRASI	5,00		3.750.000,00				
Lain-lain Alat Calibrasi	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Lain-lain Alat Calibrasi	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Lain-lain Alat Calibrasi	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Lain-lain Alat Calibrasi	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Lain-lain Alat Calibrasi	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
UNIVERSAL TESTER	4,00		18.000.000,00				
Insulation Res Meter Mod	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	
Insulation Res Meter Mod	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	
Insulation Res Meter Mod	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	
Insulation Res Meter Mod	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT UKUR/PEMBANDING	2,00		600.000,00				
Avometer Su 20 - 20 K	1,00	Unit	300.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
Avometer Su 20 - 20 K	1,00	Unit	300.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT UKUR LAIN-LAIN	12,00		365.402.000,00				
Bejana Ukur	1,00	Unit	13.534.000,00	Pengadaan APBD	03/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	7.280.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	9.625.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	11.165.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	13.534.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	29.984.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	31.295.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	39.325.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	47.520.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	49.390.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	53.625.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Bejana Ukur	1,00	Unit	59.125.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	Dinas Tenaga Kerja	
ANAK TIMBANGAN/BIARA	1,00		1.100.000,00				
Kilogram Standar	1,00	Unit	1.100.000,00	Pengadaan APBD	27/12/2013	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT PERTANIAN	2,00		4.000.000,00				
ALAT PENGOLAHAN	2,00		4.000.000,00				
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	2,00		4.000.000,00				

Lain-lain Alat Penyimpanan	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	13/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)
Lain-lain Alat Penyimpanan	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	13/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	744,00		1.070.399.682,98				
ALAT KANTOR	49,00		182.332.423,00				
MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	3,00		17.200.000,00				
Mesin Absen (Time Recorder)	1,00	Unit	5.800.000,00	Pengadaan APBD	19/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Absen (Time Recorder)
Mesin Absen (Time Recorder)	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	08/09/2015	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Absen (Time Recorder)
Mesin Penghitung Uang	1,00	Unit	3.400.000,00	Pengadaan APBD	19/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Mesin Penghitung Uang
ALAT REPRODUKSI (PENGKANDUAN)	1,00		7.475.000,00				
Lain-lain Alat Rontgen	1,00	Unit	7.475.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2013	Dinas Tenaga Kerja	Alat Reproduksi lainnya
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	31,00		79.269.370,00				
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	854.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	854.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	29/12/2006	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	29/12/2006	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	Dinas Tenaga Kerja	Lemari Besi/Metal
Lemari Kayu	1,00	Unit	1.364.784,00	Pengadaan APBD	31/12/2002	Dinas Tenaga Kerja	
Lemari Kayu	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	17/03/2008	Dinas Tenaga Kerja	
Lemari Kayu	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.343.562,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.343.562,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.343.562,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	2.250.000,00	Pengadaan APBD	07/03/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.847.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	2.980.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	2.980.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	3.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	3.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	Dinas Tenaga Kerja	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Brandkas	1,00	Unit	263.200,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Brandkas	1,00	Unit	545.700,00	Pengadaan APBD	31/12/1992	Dinas Tenaga Kerja	

Lemari Kaca	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	10/10/2007	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT KANTOR LAINNYA	14,00		78.388.053,00				
CCTV - Camera Control Television System	1,00	Unit	24.950.000,00	Pengadaan APBD	24/06/2016	Dinas Tenaga Kerja	
White Board	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	30/12/2006	Dinas Tenaga Kerja	
White Board	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	30/12/2006	Dinas Tenaga Kerja	
Peta	1,00	Unit	58.520,00	Pengadaan APBD	31/12/1997	Dinas Tenaga Kerja	
Alat Penghancur Kertas	1,00	Unit	4.025.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2015	Dinas Tenaga Kerja	
Alat Penghancur Kertas	1,00	Unit	4.000.000,00	Pengadaan APBD	16/11/2015	Dinas Tenaga Kerja	
Alat Penghancur Kertas	1,00	Unit	4.000.000,00	Pengadaan APBD	16/11/2015	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Absensi	1,00	Unit	18.476.700,00	Pengadaan APBD	16/05/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Display	1,00	Unit	902.875,00	Pengadaan APBD	31/12/2000	Dinas Tenaga Kerja	
Display	1,00	Unit	975.875,00	Pengadaan APBD	31/12/2002	Dinas Tenaga Kerja	
Display	1,00	Unit	975.875,00	Pengadaan APBD	31/12/2002	Dinas Tenaga Kerja	
LCD Projector/Infocus	1,00	Unit	10.300.000,00	Pengadaan APBD	11/03/2024	Dinas Tenaga Kerja	
Brand Kas	1,00	Unit	4.623.208,00	Pengadaan APBD	31/12/2002	Dinas Tenaga Kerja	
Brand Kas	1,00	Unit	2.100.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2015	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT RUMAH TANGGA	604,00		811.942.259,98				
MEUBELAIR	436,00		200.886.154,98				
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	417.300,00	Pengadaan APBD	31/12/1992	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	235.875,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	471.750,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	471.750,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	471.750,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	943.500,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	943.500,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	943.500,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	943.500,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	943.500,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	Dinas Tenaga Kerja	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	1.415.250,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	Dinas Tenaga Kerja	

[illegible]

Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	Dinas Tenaga Kerja	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	Dinas Tenaga Kerja	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	Dinas Tenaga Kerja	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	Dinas Tenaga Kerja	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	Dinas Tenaga Kerja	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	Dinas Tenaga Kerja	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	Dinas Tenaga Kerja	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	Dinas Tenaga Kerja	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT DAPUR	19,00		12.948.500,00				
Kompur Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	25/04/2012	Dinas Tenaga Kerja	
Kompur Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	768.500,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Kompur Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	768.500,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Kompur Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	768.500,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Kompur Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	768.500,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Kompur Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	2.300.000,00	Pengadaan APBD	18/11/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Kompur Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	1.200.000,00	Pengadaan APBD	27/12/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Tabung Gas	1,00	Unit	700.000,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Tabung Gas	1,00	Unit	700.000,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Tabung Gas	1,00	Unit	700.000,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Tabung Gas	1,00	Unit	700.000,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Rak Piring Alumunium	1,00	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	24/07/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Rak Piring Alumunium	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	25/04/2012	Dinas Tenaga Kerja	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	50.000,00	Pengadaan APBD	24/07/2009	Dinas Tenaga Kerja	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	50.000,00	Pengadaan APBD	24/07/2009	Dinas Tenaga Kerja	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	50.000,00	Pengadaan APBD	24/07/2009	Dinas Tenaga Kerja	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	324.500,00	Pengadaan APBD	22/10/2009	Dinas Tenaga Kerja	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	50.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	50.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	78,00		362.366.855,00				
Televisi	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010	Dinas Tenaga Kerja	
Televisi	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
Televisi	1,00	Unit	4.575.000,00	Pengadaan APBD	21/05/2012	Dinas Tenaga Kerja	
Televisi	1,00	Unit	7.400.000,00	Pengadaan APBD	17/06/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Televisi	1,00	Unit	6.850.000,00	Pengadaan APBD	24/08/2022	Dinas Tenaga Kerja	
Televisi	1,00	Unit	17.850.000,00	Pengadaan APBD	08/09/2022	Dinas Tenaga Kerja	
Loudspeaker	1,00	Unit	1.550.000,00	Pengadaan APBD	24/08/2022	Dinas Tenaga Kerja	
Sound System	1,00	Unit	6.840.000,00	Pengadaan APBD	25/12/2021	Dinas Tenaga Kerja	
Wireless	1,00	Unit	1.750.000,00	Pengadaan APBD	30/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	
Camera Video	1,00	Unit	15.000.000,00	Pengadaan APBD	01/06/2012	Dinas Tenaga Kerja	
Camera Video	1,00	Unit	7.450.000,00	Pengadaan APBD	31/01/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Camera Video	1,00	Unit	6.950.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	
Camera Video	1,00	Unit	6.997.295,00	Pengadaan APBD	19/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	

Kursi Kerja	1,00	Unit	225.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	225.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	225.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	225.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	225.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	225.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	225.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	225.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	4,00		1.800.000,00				
Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2005	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2005	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2005	Dinas Tenaga Kerja	
Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2005	Dinas Tenaga Kerja	
LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5,00		23.800.000,00				
Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1,00	Unit	9.765.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1,00	Unit	3.475.000,00	Pengadaan APBD	30/06/2011	Dinas Tenaga Kerja	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1,00	Unit	3.475.000,00	Pengadaan APBD	30/06/2011	Dinas Tenaga Kerja	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1,00	Unit	3.685.000,00	Pengadaan APBD	03/12/2012	Dinas Tenaga Kerja	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1,00	Unit	3.400.000,00	Pengadaan APBD	30/08/2013	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	21,00		161.036.000,00				
ALAT STUDIO	19,00		153.036.000,00				
PERALATAN STUDIO AUDIO	4,00		35.635.000,00				
Professional Sound System	1,00	Unit	7.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010	Dinas Tenaga Kerja	
Professional Sound System	1,00	Unit	10.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
Professional Sound System	1,00	Unit	15.000.000,00	Pengadaan APBD	01/06/2012	Dinas Tenaga Kerja	
Professional Sound System	1,00	Unit	3.635.000,00	Pengadaan APBD	09/11/2016	Dinas Tenaga Kerja	
PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	15,00		117.401.000,00				

Camera Electronic	1,00	Unit	5.570.000,00	Pengadaan APBD	02/06/2006	Dinas Tenaga Kerja	
Camera Electronic	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2008	Dinas Tenaga Kerja	
Camera Electronic	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	14/05/2008	Dinas Tenaga Kerja	
Camera Electronic	1,00	Unit	6.900.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
Camera Electronic	1,00	Unit	8.300.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
Photo Tustel	1,00	Unit	5.155.000,00	Pengadaan APBD	26/02/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	10.000.000,00	Pengadaan APBD	15/09/2008	Dinas Tenaga Kerja	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	7.476.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	Dinas Tenaga Kerja	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	9.500.000,00	Pengadaan APBD	15/07/2010	Dinas Tenaga Kerja	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	8.350.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2012	Dinas Tenaga Kerja	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	6.500.000,00	Pengadaan APBD	10/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	5.500.000,00	Pengadaan APBD	30/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	9.550.000,00	Pengadaan APBD	10/02/2016	Dinas Tenaga Kerja	
Camera Conference	1,00	Unit	16.600.000,00	Pengadaan APBD	24/08/2022	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT KOMUNIKASI	2,00		8.000.000,00				
ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	2,00		8.000.000,00				
Facsimile	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	20/02/2013	Dinas Tenaga Kerja	
Facsimile	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6,00		7.928.080,00				
ALAT KEDOKTERAN	6,00		7.928.080,00				
ALAT KEDOKTERAN UMUM	4,00		3.728.080,00				
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1,00	Unit	199.280,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	Dinas Tenaga Kerja	
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1,00	Unit	132.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1991	Dinas Tenaga Kerja	
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1,00	Unit	1.698.000,00	Pengadaan APBD	15/05/2020	Dinas Tenaga Kerja	
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1,00	Unit	1.698.000,00	Pengadaan APBD	15/05/2020	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT KEDOKTERAN GIGI	2,00		4.200.000,00				
Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi	1,00	Unit	2.100.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi	1,00	Unit	2.100.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT LABORATORIUM	27,00		105.000.000,00				
UNIT ALAT LABORATORIUM	23,00		87.000.000,00				
ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	3,00		1.800.000,00				
	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	02/04/2015	Dinas Tenaga Kerja	
	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	02/04/2015	Dinas Tenaga Kerja	
	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	02/04/2015	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT LABORATORIUM UMUM	2,00		1.600.000,00				
Spray Gun	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Spray Gun	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	18,00		83.600.000,00				
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	

Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	APBD		Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Jahit Pasang Kancing	1,00	Unit	3.400.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	Dinas Tenaga Kerja	
Mesin Jahit Pasang Kancing	1,00	Unit	3.400.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	Dinas Tenaga Kerja	
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4,00		18.000.000,00				
PEMESINAN : ELECTRICAL WORKSHOP	4,00		18.000.000,00				
Eart Tester	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	
Eart Tester	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	
Eart Tester	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	
Eart Tester	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	
KOMPUTER	253,00		1.537.701.595,00				
KOMPUTER UNIT	117,00		1.278.104.576,00				
PERSONAL KOMPUTER	117,00		1.278.104.576,00				
P.C Unit	1,00	Unit	9.675.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2012	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	4.900.000,00	Pengadaan APBD	05/04/2012	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.500.000,00	Pengadaan APBD	27/02/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	9.923.500,00	Pengadaan APBD	30/09/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.965.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.950.000,00	Pengadaan APBD	24/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.950.000,00	Pengadaan APBD	24/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	14/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	9.900.000,00	Pengadaan APBD	16/07/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal

P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	7.925.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	11.044.350,00	Pengadaan APBD	22/01/2016	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2017	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	13.500.000,00	Pengadaan APBD	04/08/2020	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	13.500.000,00	Pengadaan APBD	04/08/2020	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
Lap Top	1,00	Unit	14.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	10.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.900.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	12.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	14.950.000,00	Pengadaan APBD	05/03/2012	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	11.850.000,00	Pengadaan APBD	20/03/2012	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	7.850.000,00	Pengadaan APBD	31/01/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.950.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.450.000,00	Pengadaan APBD	27/02/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.450.000,00	Pengadaan APBD	27/02/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	6.000.000,00	Pengadaan APBD	04/09/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	7.945.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	10/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	7.900.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	25/06/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.800.000,00	Pengadaan APBD	03/03/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	12.470.000,00	Pengadaan APBD	21/04/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.000.000,00	Pengadaan APBD	08/09/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	14/10/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	5.522.726,00	Pengadaan APBD	22/10/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	27/10/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top

[illegible]

Lap Top	1,00	Unit	14.500.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2023	Dinas Tenaga Kerja	
Lap Top	1,00	Unit	14.100.000,00	Pengadaan APBD	11/03/2024	Dinas Tenaga Kerja	
Lap Top	1,00	Unit	14.100.000,00	Pengadaan APBD	11/03/2024	Dinas Tenaga Kerja	
Lap Top	1,00	Unit	19.100.000,00	Pengadaan APBD	11/03/2024	Dinas Tenaga Kerja	
Lap Top	1,00	Unit	19.100.000,00	Pengadaan APBD	11/03/2024	Dinas Tenaga Kerja	
Note Book	1,00	Unit	9.000.000,00	Pengadaan APBD	01/06/2012	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Note Book	1,00	Unit	4.040.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Note Book	1,00	Unit	3.500.000,00	Pengadaan APBD	04/12/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
lain-lain Personal Komputer	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
lain-lain Personal Komputer	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	29/11/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lokal
PERALATAN KOMPUTER	136,00		259.597.019,00				
PERALATAN MAINFRAME	1,00		9.885.000,00				
CPU (Peralatan Mainframe)	1,00	Unit	9.885.000,00	Pengadaan APBD	30/06/2011	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
PERALATAN MINI KOMPUTER	1,00		500.000,00				
Speaker Komputer	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	31/01/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	122,00		232.581.019,00				
Monitor	1,00	Unit	1.800.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Monitor	1,00	Unit	7.650.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	2.475.000,00	Pengadaan APBD	31/01/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	3.500.000,00	Pengadaan APBD	27/02/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	6.250.000,00	Pengadaan APBD	27/02/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	20/05/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	20/05/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	3.475.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	03/09/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	1.962.400,00	Pengadaan APBD	30/09/2013	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	2.469.250,00	Pengadaan APBD	11/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	2.469.250,00	Pengadaan APBD	11/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	2.500.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	24/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	24/02/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	10/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	2.500.000,00	Pengadaan APBD	02/03/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	11/03/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	11/03/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	7.275.000,00	Pengadaan APBD	17/03/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	4.296.000,00	Pengadaan APBD	12/05/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1,00	Unit	1.900.000,00	Pengadaan APBD	27/10/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top

Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.100.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.100.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.100.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.100.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.050.000,00	Pengadaan APBD	04/11/2019	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.050.000,00	Pengadaan APBD	04/11/2019	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.050.000,00	Pengadaan APBD	04/11/2019	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.050.000,00	Pengadaan APBD	04/11/2019	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	920.000,00	Pengadaan APBD	04/08/2020	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	920.000,00	Pengadaan APBD	04/08/2020	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
PERALATAN JARINGAN	11,00		15.860.000,00				
Modem	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	05/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Modem	1,00	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	21/04/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Modem	1,00	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	18/05/2015	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Wireless Access Point	1,00	Unit	2.925.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2010	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Acces Point	1,00	Unit	1.870.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
Acces Point	1,00	Unit	925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1,00	Unit	925.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1,00	Unit	925.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1,00	Unit	925.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1,00	Unit	2.440.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1,00	Unit	1.425.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	1,00		771.000,00				
USB-C To USB-A HUB With Ethernet	1,00	Unit	771.000,00	Pengadaan APBD	27/12/2021	Dinas Tenaga Kerja	Lap Top
GEDUNG DAN BANGUNAN	12		6.502.626.953,23				
BANGUNAN GEDUNG	10		5.253.503.573,23				
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	5		2.831.947.955,13				
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Meter Persegi	944.161.575,79	Pengadaan APBD	31/12/1984	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Meter Persegi	1.433.033.716,80	Pengadaan APBD	31/12/1984	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Meter Persegi	376.627.470,80	Pengadaan APBD	31/12/1984	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Meter Persegi	41.764.721,87	Pengadaan APBD	31/12/1984	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Meter Persegi	36.360.469,87	Pengadaan APBD	31/12/1984	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	2		482.090.809,55				
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Meter Persegi	385.005.392,75	Pengadaan APBD	31/12/1984	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3		1.939.464.808,55				
RUMAH NEGARA GOLONGAN III	1		3.263.352,15				
Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Meter Persegi	3.263.352,15	Pengadaan APBD	31/12/1984	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	1		2.584.456,40				
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Meter Persegi	2.584.456,40	Pengadaan APBD	31/12/1984	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
ASRAMA	1		1.933.617.000,00				
Asrama Darurat	1	Meter Persegi	1.933.617.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2019	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 31-12-2019] 0
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2		1.249.123.380,00				

TUGU/TANDA BATAS	2		1.249.123.380,00				
TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	1		698.380,00				
Lain-lain Tugu/Tanda Batas	1	Meter Persegi	698.380,00	Pengadaan APBD	15/11/2011	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 15-11-2011] 0
PAGAR	1		1.248.425.000,00				
Pagar Permanen	1	Meter Persegi	1.248.425.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2019	Dinas Tenaga Kerja	[Tgl Awal: 31-12-2019] 0
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	11		373.437.291,95				
JALAN DAN JEMBATAN	1		183.877.000,00				
JEMBATAN	1		183.877.000,00				
JEMBATAN PENYEBERANGAN	1		183.877.000,00				
Jembatan Penyebrangan Beton	1	Meter	183.877.000,00		31/12/2019	Dinas Tenaga Kerja	Mutasi Dari DPKPP tahun 2019
BANGUNAN AIR	1		1.799.091,95				
BANGUNAN AIR IRIGASI	1		1.799.091,95				
BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	1		1.799.091,95				
Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1	Meter	1.799.091,95		02/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	Bangunan
INSTALASI	8		155.179.500,00				
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1		84.700.000,00				
INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	1		84.700.000,00				
Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Sedang	1	Meter	84.700.000,00		19/12/2018	Dinas Tenaga Kerja	Bangunan Ukur
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1		20.900.000,00				
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	1		20.900.000,00				
Instalasi PLTU Kapasitas Sedang	1	Meter	20.900.000,00		14/12/2007	Dinas Tenaga Kerja	Jaringan
INSTALASI GARDU LISTRIK	6		49.579.500,00				
INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	1		20.366.000,00				
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	Meter	20.366.000,00		25/10/2013	Dinas Tenaga Kerja	tambah daya BLK
INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	5		29.213.500,00				
Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	1	Meter	9.933.500,00		23/08/2013	Dinas Tenaga Kerja	pengadaan instalasi listrik
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	1	Meter	4.500.000,00		04/09/2009	Dinas Tenaga Kerja	tambah daya
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	1	Meter	4.900.000,00		10/02/2010	Dinas Tenaga Kerja	Jaringan
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	1	Meter	4.920.000,00		21/04/2011	Dinas Tenaga Kerja	tambah daya
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	1	Meter	4.960.000,00		26/03/2012	Dinas Tenaga Kerja	Jaringan
JARINGAN	1		32.581.700,00				
JARINGAN LISTRIK	1		32.581.700,00				
JARINGAN DISTRIBUSI	1		32.581.700,00				
Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	Meter	32.581.700,00		01/12/2014	Dinas Tenaga Kerja	Pemeliharaan rutin/berkals sarana dan prasarana aparatur
ASET TETAP LAIN	48		22.405.713,74				
BAHAN PERPUSTAKAAN	48		22.405.713,74				
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	40		18.150.000,00				
SERIAL	40		18.150.000,00				
Serial Lain-Lain	40		18.150.000,00				
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	25/04/2007	Dinas Tenaga Kerja	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	25/04/2007	Dinas Tenaga Kerja	

BAHAN KARTOGRAFI	7		276.120,00				
Atlas	7		276.120,00				
Atlas	1	Unit	16.920,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	
Atlas	1	Unit	16.920,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	
Atlas	1	Unit	16.920,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	
Atlas	1	Unit	43.800,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	
Atlas	1	Unit	56.640,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	
Atlas	1	Unit	58.520,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	
Atlas	1	Unit	66.400,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	Dinas Tenaga Kerja	

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik dalam perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

b. Tujuan

1. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo;
2. Sebagai bahan pertimbangan perbaikan berkesinambungan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja.
3. Mewujudkan transparansi dan kredibilitas instansi pemerintah.
4. Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.3. Landasan Hukum

- a. Landasan hukum dalam penyusunan LKjPD Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, antara lain :
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
- o. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- p. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- q. Peraturan Bupati Probolinggo No. 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.4. Permasalahan Utama Berdasarkan Tusi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 1.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

No	Permasalahan (Masalah real yg terjadi di PD/Kec)	Akar Masalah (Penyebab masalah)	Isu Strategis (Prioritas masalah yang perlu diselesaikan)	Arah Kebijakan (strategi penanganan masalah prioritas)
1	Tingginya angka pengangguran, khususnya lulusan pendidikan menengah dan usia produktif	Kompetensi dan keterampilan pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal	Peningkatan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri
2	Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri	Kurikulum dan pelatihan harus berbasis kebutuhan industri lokal	Penguatan keterkaitan pelatihan kerja dengan kebutuhan industri	Penyusunan program pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja
3	Terbatasnya kesempatan kerja formal di Kabupaten Probolinggo	Minimnya investasi padat karya dan terbatasnya sektor industri	Perluasan kesempatan kerja	Pengembangan program padat karya, pemagangan, dan kewirausahaan
4	Belum optimalnya peran UPT BLK Kabupaten Probolinggo	Keterbatasan sarana prasarana, peralatan, instruktur, dan anggaran	Penguatan fungsi UPT BLK Kabupaten Probolinggo	Peningkatan sarana prasarana, peralatan pelatihan, dan kompetensi instruktur

5	Rendahnya penempatan tenaga kerja lokal	Kurangnya sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri	Peningkatan penempatan tenaga kerja lokal	Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri serta perluasan jaringan penempatan kerja
6	Terbatasnya akses informasi pasar kerja	Sistem informasi pasar kerja belum optimal	Penguatan sistem informasi pasar kerja daerah	Pengembangan layanan informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat
7	Masih munculnya perselisihan hubungan industrial	Rendahnya pemahaman pekerja dan pemberi kerja terhadap regulasi ketenagakerjaan	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial harmonis	Peningkatan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan ketenagakerjaan

Berdasarkan analisis kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Probolinggo, permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya angka pengangguran, khususnya pada lulusan SMA/SMK dan usia produktif, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Akar permasalahan tersebut meliputi rendahnya keterampilan pencari kerja, keterbatasan pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, belum optimalnya peran UPT BLK Kabupaten Probolinggo, serta terbatasnya kesempatan kerja dan sinergi dengan dunia usaha dan industri.

Sehubungan dengan hal tersebut, isu strategis ketenagakerjaan Kabupaten Probolinggo diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal, penurunan tingkat pengangguran, penguatan peran UPT BLK, serta perluasan kesempatan kerja. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, optimalisasi sarana prasarana dan instruktur UPT BLK, penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, perluasan program padat karya dan kewirausahaan, serta peningkatan pelayanan informasi pasar kerja dan pembinaan ketenagakerjaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran program kegiatan tahun 2025, terdiri dari:

a. Tujuan dan Sasaran Renstra RPJMD 2025-2029 yang diampu Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Probolinggo sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Dinas Tenaga Kerja berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029, yaitu **“meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing dalam upaya pengentasan kemiskinan serta terwujudnya ketahanan sosial dan ketahanan daerah yang berbasis kesetaraan gender dan kearifan lokal”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran pembangunan, yaitu **“Meningkatnya kualitas SDM yang kompetitif”** dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, serta **“Meningkatnya ketahanan daerah dan pemberdayaan masyarakat rentan dan disabilitas”** dengan indikator persentase disabilitas yang berdaya (bekerja di sektor formal).

b. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran misi 2 dan misi 5 RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif”** dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, serta **“Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas”** dengan indikator Persentase Disabilitas yang Berdaya (bekerja di sektor formal).

Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja

No	tujuan	Sasaran	indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,30 %	73,50 %	73,70 %	73,80 %	74,00 %
			Tingkat Kesempatan Kerja	96,83 %	96,86 %	96,89 %	96,92 %	96,95 %
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	33,12 %	34,83 %	36,54 %	38,25 %	39,95 %
		Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	0,50 %	0,80 %	1,00 %	1,10 %	1,10 %
	Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	Meningkatnya disabilitas yg bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta	Persentase disabilitas bekerja di instansi pemerintah	1,60	1,80	2,00	2,30	2,70

			Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta	0,50	0,70	1,00	1,20	1,30
--	--	--	---	------	------	------	------	------

1. Sasaran 1: Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

indikator

- 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- 2) Tingkat Kesempatan Kerja
- 3) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

2. Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Perangkat Daerah

Indikator

- 1) Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah

3. Sasaran 3: Meningkatnya disabilitas yang bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta.

Indikator

- 1) Persentase disabilitas bekerja di instansi pemerintah
- 2) Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama sasaran strategis Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai dengan keputusan Kepala PD tentang IKU PD.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja tahun 2025

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Angkatan Kerja Dibagi Penduduk Usia Kerja Dikali 100%	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Balai Latihan Kerja (BLK)	DINAS TENAGA KERJA
	Tingkat Kesempatan Kerja	Penduduk Bekerja Dibagi Angkatan Kerja Dikali 100%	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketransmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja	

	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Jaminan Sosial Dibagi Jumlah Total Pekerja Dikali 100%	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	
Meningkatnya disabilitas yg bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta	Persentase disabilitas bekerja di instansi pemerintah	Jumlah Pegawai Disabilitas dibagi Jumlah Total Pegawai di instansi pemerintah Kali 100%	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketransmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja	
	Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta	Jumlah Pegawai Disabilitas dibagi Jumlah Total Pegawai di perusahaan swasta Kali 100%	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketransmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja	
Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	Persentase kenaikan AKIP = nilai LHE AKIP tahun-n dikurangi nilai LHE AKIP tahun n-1 dibagi nilai LHE AKIP tahun n-1 dikali 100	Dinas Tenaga Kerja	

2.3. Sasaran Strategis, Program, Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis, Program, Kegiatan Dinas Tenaga Kerja tahun 2025

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Industrial Hubungan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
		Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit

		Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan antar Kerja
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
		Perluasan Kesempatan Kerja
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
		Job Fair/Bursa Kerja
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota
Meningkatnya disabilitas yg bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta	Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja sasaran strategis ini kemudian diturunselaraskan (*cascading*) dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaiannya sekaligus diintegrasikan dengan penganggaran.

Tabel 2.4

Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Tribulanan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,30	16,3	18	19	20
		Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,83	19,83	20	28	29
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	33,12	7,12	8,5	8,5	9
2	Meningkatnya disabilitas yg	Persentase disabilitas bekerja di instansi	%	1,60	0,3	0,4	0,4	0,5

	bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta	pemerintah						
		Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta	%	0,50	0,10	0,10	0,10	0,20
3	Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	0,50	-	-	-	0,50

2.5. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

Berisi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (akad atau janji antara penerima amanah (Kepala PD) dengan pemberi amanah (Bupati Probolinggo) untuk mencapai kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,30
2		Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,83
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	33,12
	Meningkatnya disabilitas yg bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta	Persentase disabilitas bekerja di instansi pemerintah	%	1,60
		Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta	%	0,50
	Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	0,50

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan pengukuran capaian atas kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja utama dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dengan Bupati Probolinggo tahun 2025. Sedangkan capaian indikator kinerja individu dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang diperjanjikan antara atasan selaku pemberi amanah dengan staf sebagai penerima amanah secara berjenjang.

Hasil capaian kinerja diberikan skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Lebih dari 100	Sangat Baik
2.	75 – 100 %	Baik
3.	50 – 74 %	Cukup
4.	≤50 %	Kurang

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo digunakan untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2025, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dapat dilihat

sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Renstra 2024-2026						
1	Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan / kompetensi	80,5%	80%	99%	Sangat Baik
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang di tempatkan	43%	43%	100%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial, dan Pengupahan	Persentase Peningkatan penyelesaian perselisihan kausu ketenagakerjaan	37%	37%	100%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE SAKIP Perangkat Daerah	5%	0	0	Kurang
Renstra 2025-2029						
1	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,30%	76,72%	105%	Sangat Baik

		Tingkat Kesempatan Kerja	96,83%	97,08%	100%	Sangat Baik
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	33,12%	22,67%	68%	Cukup
	Meningkatnya disabilitas yg bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta	Persentase disabilitas bekerja di instansi pemerintah	1,60%	0,074%	5%	Kurang
		Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta	0,50%	0,012%	2,4%	Kurang
	Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	0,50%	0,00	0	Kurang

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, pada periode Renstra 2024–2026, sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan/kompetensi mencapai 80% dari target 80,5% (99%), sedangkan persentase pencari kerja yang ditempatkan serta penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan masing-masing mencapai 100% dari target. Hal ini menunjukkan optimalnya upaya peningkatan kompetensi, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Sementara itu, indikator kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah tidak mengalami kenaikan nilai dikarenakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum berjalan secara optimal dan konsisten. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, sebagaimana terlihat dari adanya kekurangan pegawai yang signifikan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), turut berdampak pada kualitas

penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Pada periode Renstra 2025–2029, Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditargetkan sebesar 73,30% dan terealisasi sebesar 76,72% atau mencapai 105% dari target dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar kerja serta adanya perbaikan akses terhadap informasi dan peluang kerja. Indikator Tingkat Kesempatan Kerja ditargetkan sebesar 96,83% dan terealisasi sebesar 97,08% atau mencapai 100% dari target dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, pada indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dari target sebesar 33,12% hanya terealisasi 22,67% atau 68% dari target dengan kategori Cukup. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh perbedaan definisi data yang diterima (keaktifan peserta) dengan indikator yang ditetapkan (kepesertaan), serta masih rendahnya kepatuhan perusahaan dan pekerja sektor informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada indikator Persentase Disabilitas Bekerja di Instansi Pemerintah, target sebesar 1,60% terealisasi 0,074% atau 5% dari target dengan kategori Kurang. Sedangkan pada indikator Persentase Disabilitas Bekerja di Perusahaan Swasta, dari target 0,50% hanya terealisasi 0,012% atau 2,4% dari target dengan kategori Kurang. Capaian yang masih rendah ini disebabkan oleh belum optimalnya implementasi kebijakan pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas, keterbatasan data tenaga kerja disabilitas yang siap kerja, rendahnya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta masih adanya persepsi dan keterbatasan aksesibilitas di lingkungan kerja.

Indikator Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 0,50%, namun belum mengalami kenaikan (0,00%) sehingga capaian sebesar 0% dengan kategori Kurang. mengalami kenaikan nilai dikarenakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum berjalan secara optimal dan konsisten. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, sebagaimana terlihat dari adanya kekurangan pegawai yang signifikan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), turut berdampak pada kualitas penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Sedangkan hasil perhitungan capaian IKU Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ke-n

Tabel 3.3

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 Renstra 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Th 2025	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja (%)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,3	76,72	105
Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,83	97,08	100
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	33,12	22,67	68
Persentase disabilitas bekerja di instansi pemerintah	Persentase disabilitas bekerja di instansi pemerintah	%	1,6	0,074	5
Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta	Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta	%	0,5	0,012	2,4
Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	0,5	0	0

Pada Tahun 2025, indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 76,72% dari target 73,3% atau mencapai 105%. Demikian pula Tingkat Kesempatan Kerja terealisasi sebesar 97,08% dari target 96,83% (100%), yang

menunjukkan kondisi pasar kerja yang relatif stabil dan mampu menyerap angkatan kerja secara optimal.

Namun demikian, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru mencapai 22,67% dari target 33,12% atau sebesar 68%, sehingga masih dalam kategori cukup dan memerlukan upaya peningkatan kepesertaan.

Sementara itu, indikator terkait inklusivitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas masih menunjukkan capaian yang rendah. Persentase disabilitas yang bekerja di instansi pemerintah hanya mencapai 0,074% dari target 1,6% (5%), dan di perusahaan swasta sebesar 0,012% dari target 0,5% (2,4%). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan afirmatif dan perluasan kesempatan kerja yang lebih inklusif.

Adapun Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah belum menunjukkan capaian (0% dari target 0,5%), sehingga aspek akuntabilitas kinerja perangkat daerah perlu menjadi perhatian dan prioritas perbaikan pada periode selanjutnya.

- b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ke-n dengan target akhir RPJMD yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025
dengan target akhir Renstra 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Akhir RENSTRA	
			2025	2029	Capaian 2025 Terhadap Target 2029
Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,72	74	104
	Tingkat Kesempatan Kerja	%	97,08	96,95	100

		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	22,67	39,95	57
	Meningkatnya disabilitas yg bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta	Persentase disabilitas bekerja di instansi pemerintah	%	0,074	2,7	2,7
		Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta	%	0,012	1,3	0,9
	Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	0	1,10	-

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2029, pada sasaran Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja telah melampaui target akhir, dengan capaian 76,72% dibanding target 74% (104%). Demikian pula Tingkat Kesempatan Kerja mencapai 97,08% dari target 96,95% (100%), yang menunjukkan kinerja yang sudah sesuai bahkan melebihi target jangka menengah.

Namun demikian, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru mencapai 22,67% dari target akhir 39,95% atau sebesar 57%, sehingga masih memerlukan upaya percepatan untuk mencapai target 2029.

Pada sasaran Meningkatkan Disabilitas yang Bekerja di Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta, capaian masih sangat rendah. Persentase disabilitas yang bekerja di instansi pemerintah baru mencapai 0,074% dari target 2,7% (2,7%), sedangkan di perusahaan swasta sebesar 0,012% dari target 1,3% (0,9%). Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi afirmatif dan kolaborasi lintas sektor guna mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah, indikator Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat

Daerah belum menunjukkan capaian (0%) dibanding target akhir 1,10%, sehingga perlu menjadi perhatian khusus dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja ke depan.

c. Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Berisi penjelasan identifikasi keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta alternatif solusi dan inovasi yang telah dilakukan serta program dan kegiatan apa saja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

Tabel 3.5
Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala dan Permasalahan	Alternatif solusi/ Inovasi	Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ inovasi
1	Peningkatan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dukungan anggaran pelatihan, kerja sama dengan perusahaan, serta lembaga pelatihan kerja	Penempatan tenaga kerja belum optimal	Keterbatasan lowongan kerja dan mismatch kompetensi	Penyelarasan pelatihan berbasis kebutuhan industri	Job fair rutin, MoU dengan perusahaan, pemetaan kebutuhan tenaga kerja
2	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara mediasi	Adanya mediator bersertifikat dan koordinasi dengan perusahaan	Tidak semua kasus dapat diselesaikan secara damai	Kurangnya pemahaman regulasi ketenagakerjaan oleh pekerja dan pengusaha	Sosialisasi regulasi ketenagakerjaan secara berkala	Sosialisasi UU Ketenagakerjaan, forum komunikasi tripartit
3	Peningkatan perlindungan tenaga kerja	Pengawasan rutin dan laporan masyarakat	Pengawasan belum menjangkau seluruh perusahaan	Keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan	Digitalisasi pelaporan dan pengaduan	Sistem pengaduan online, peningkatan kapasitas pengawas
4	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	Pertumbuhan sektor usaha dan fasilitasi penempatan kerja	Belum meratanya penyerapan tenaga kerja	Kesenjangan informasi pasar kerja dan keterbatasan akses wilayah	Penguatan sistem informasi pasar kerja berbasis digital	Bursa kerja online, job fair
5	Peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dukungan regulasi dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta pemberian bantuan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan masih rendah	Rendahnya kesadaran pekerja informal dan UMKM	Pemberian bantuan sosial bpjs ketenagakerjaan	Sosialisasi sektor informal dan Pemberian bantuan sosial bpjs ketenagakerjaan

Berdasarkan tabel capaian kinerja yang disajikan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja telah menunjukkan arah yang positif dalam mendukung peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja. Keberhasilan peningkatan jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi menjadi salah satu indikator bahwa dukungan anggaran, kerja sama dengan perusahaan, serta sinergi dengan lembaga pelatihan kerja telah berjalan cukup efektif. Hal ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap memasuki dunia kerja. Namun demikian, keberhasilan pada aspek pelatihan belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya penempatan tenaga kerja. Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri (mismatch kompetensi), serta keterbatasan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi link and match melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara lebih akurat dan berbasis data pasar kerja.

Pada aspek hubungan industrial, penyelesaian perselisihan melalui mekanisme mediasi menunjukkan kinerja yang cukup baik, didukung oleh keberadaan mediator bersertifikat dan koordinasi yang solid dengan perusahaan. Meskipun demikian, tidak semua kasus dapat diselesaikan secara damai. Permasalahan ini umumnya dipengaruhi oleh masih kurangnya pemahaman pekerja maupun pengusaha terhadap regulasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi regulasi ketenagakerjaan secara berkala menjadi langkah strategis untuk meminimalisir potensi perselisihan di masa mendatang. Forum komunikasi tripartit juga perlu terus dioptimalkan sebagai wadah dialog dan penyelesaian permasalahan secara konstruktif.

Dalam hal perlindungan tenaga kerja, kegiatan pengawasan telah dilaksanakan secara rutin dan diperkuat oleh partisipasi masyarakat melalui laporan atau pengaduan. Akan tetapi, pengawasan belum mampu menjangkau seluruh perusahaan yang ada. Keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan menjadi kendala utama. Upaya digitalisasi sistem pelaporan dan pengaduan merupakan inovasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Meski demikian, digitalisasi

harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas agar pengawasan substantif tetap berjalan optimal/

Selanjutnya, pada aspek penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan sektor usaha dan fasilitasi layanan penempatan kerja telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja. Namun, penyerapan tenaga kerja belum merata di seluruh wilayah. Kesenjangan informasi pasar kerja dan keterbatasan akses di beberapa wilayah menjadi hambatan utama. Penguatan sistem informasi pasar kerja berbasis digital, seperti bursa kerja online dan job fair, merupakan langkah strategis untuk memperluas akses informasi dan mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja secara lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih menjadi tantangan yang cukup signifikan. Walaupun telah didukung oleh regulasi, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberian bantuan jaminan sosial, cakupan kepesertaan masih relatif rendah, terutama pada sektor informal dan pelaku UMKM. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan sosial serta keterbatasan kemampuan membayar iuran menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, strategi jemput bola, sosialisasi yang lebih masif, serta pemberian bantuan iuran bagi pekerja rentan perlu terus diperluas dan ditargetkan secara tepat sasaran.

Secara keseluruhan, analisis tabel menunjukkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja telah berada pada jalur yang tepat, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan penguatan hubungan industrial. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek penyelarasan kompetensi dengan kebutuhan industri, pemerataan penyerapan tenaga kerja, perluasan kepesertaan jaminan sosial, serta peningkatan kapasitas pengawasan. Transformasi digital layanan ketenagakerjaan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Dengan strategi yang terintegrasi dan berbasis data, diharapkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan dapat tercapai secara lebih efektif dan inklusif.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada periode pelaporan ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Anggaran yang dialokasikan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan efektif dan efisien.

Tabel 3.6

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	6.456.223.000,00	4.617.885.212,00	72
		Tingkat Kesempatan Kerja	557.416.948,00	552.031.144,00	99
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	4.475.350.600,00	4.429.003.727,00	99
2	Meningkatnya disabilitas yg bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta	Persentase disabilitas bekerja di instansi pemerintah	-	-	-
		Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta	-	-	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	6.513.210.050,00	5.965.117.741,00	91,58

Realisasi anggaran menunjukkan penyerapan yang cukup baik dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja. Untuk sasaran peningkatan produktivitas tenaga kerja dan hubungan industrial, dari pagu anggaran sebesar Rp 6.456.223.000,00, realisasi tercapai Rp 4.617.885.212,00 atau 72%. Pada indikator tingkat kesempatan kerja dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, realisasi masing-masing mencapai 99%, menunjukkan pelaksanaan program yang hampir sesuai target.

Sementara itu, sasaran peningkatan disabilitas yang bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta belum terdapat data pagu dan realisasi, sehingga capaian belum dapat diukur pada periode ini.

Untuk sasaran peningkatan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah, dari pagu anggaran Rp 6.513.210.050,00, realisasi mencapai Rp 5.965.117.741,00 atau 91,58%, yang menunjukkan pelaksanaan program berjalan efektif dan mendekati target.

3.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Tabel 3.7

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			SUMBER DANA	OUTPUT / KELUARAN			
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.513.210.050,00	5.965.117.741,00	91,58		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.130.700,00	36.866.604,00	99,29		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

						dilapork an tepat waktu			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.130. 700,00	16.866.604 ,00	98,46	Silpa	Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyus unan Dokume n RKA- SKPD	1 Dokume n	1 Dokum en	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.000.0 00,00	9.000.000, 00	100,00	Silpa	Jumlah Dokume n Perubah an RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyus unan Dokume n Perubah an RKA- SKPD	1 Dokume n	1 Dokum en	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.000. 000,00	11.000.000 ,00	100,00	Silpa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas i Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyus unan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas i Kinerja SKPD	2 Dokume n	2 Dokum en	100%
	Administras i Keuangan Perangkat	4.900.4 51.247,	4.635.358. 659,00	94,59		Jumlah dokume n	1 Dokume n	1 Dokum en	100%

	Daerah	00				Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.893.031.947,00	4.628.234.359,00	94,59	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.419.300,00	7.124.300,00	96,02	Silpa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.024.900,00	92.427.865,00	96,25		Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD	85%	85%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.581.000,00	11.296.365,00	97,54	Silpa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.507.000,00	52.580.589,00	94,73	PAD, Silpa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%

						yang Disedi ak an			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.696.0 00,00	9.572.428, 00	98,73	Silpa	Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disedi ak an	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.761.9 00,00	9.698.297, 00	99,35	Silpa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedi ak an	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	9.479.0 00,00	9.280.186, 00	97,90	Silpa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengg ndaan yang Disedi ak an	2 Paket	2 Paket	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	1.366.0 53.203, 00	1.091.370. 448,00	79,89		Jumlah pemu nuhan laporan Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan PD	2 Laporan	2 Lapora n	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	102.098 .019,00	94.700.500 ,00	92,75	PAD	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedi ak an	1 Laporan	1 Lapora n	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.263.9 55.184, 00	996.669.94 8,00	78,85	DBH, DAU, Silpa	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum	1 Laporan	1 Lapora n	100%

						Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.550.000,00	109.094.165,00	96,08		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	6 Unit	6 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.500.000,00	98.081.165,00	95,69	PAD, Silpa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.050.000,00	11.013.000,00	99,67	Silpa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	100%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.456.223.000,00	4.617.885.212,00	71,53		Persentase tenaga kerja yang meningkatkan produktivitasnya	80%	80%	100%
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	6.454.958.400,00	4.617.685.212,00	71,54		Jumlah peserta yang lulus pelatihan	1232 Orang	848 Orang	100%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	6.454.958.400,00	4.617.685.212,00	71,54	DBH-CHT	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat	1232 Orang	848 Orang	69%

	Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.264.600,00	200.000,00	15,82		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mengusulkan akreditasi	10 Lembaga	5 Lembaga	50%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.264.600,00	200.000,00	15,82	Silpa	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	5 Lembaga	50%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	557.416.948,00	552.031.144,00	99,03		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	43%	43%	100%
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	457.710.000,00	455.351.000,00	99,48		Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	85%	85%	100%
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	7.710.000,00	7.701.000,00	99,88	Silpa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	1527 Orang	3.054%
	Perluasan Kesempatan Kerja	450.000.000,00	447.650.000,00	99,48	PAD, Silpa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluas	100 Orang	102 Orang	102%

						an Kesemp atan Kerja			
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	64.370.500,00	61.906.400,00	96,17		Jumlah informasi pasar kerja yang diberika n	10 Informa si	10 Informa asi	100%
	Job Fair/Bursa Kerja	64.370.500,00	61.906.400,00	96,17	Silpa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendap atkan Pekerja an Melalui Job Fair /Bursa Kerja	50 Orang	80 Orang	160%
	Pelindunga n PMI (Pra dan Purna Penempata n) di Daerah Kabupaten/ Kota	35.336.448,00	34.773.744,00	98,41		jumlah perlindu ngan PMI yang diberika n	20 Orang	20 Orang	100%
	Peningkata n Pelindunga n dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Peke rja Migran Indonesia (PMI)	35.336.448,00	34.773.744,00	98,41	Silpa	Jumlah CPMI/P MI yang Dilindun gi dan Ditingka tkan Kompet ensinya	20 Orang	20 Orang	100%
	PROGRAM HUBUNGA N INDUSTRI AL	4.475.350.600,00	4.429.003.727,00	98,96		Persent ase perusah aan yang menera pkan tata kelola kerja yang layak	37 %	37 %	100%
	Pengesaha n Peraturan Perusahaa n dan Pendaftara n Perjanjian Kerja	35.310.000,00	29.336.037,00	83,08		Persent ase perusah aan yang memiliki peratura	100 %	100 %	100%

	Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					n perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama			
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	35.310.000,00	29.336.037,00	83,08	Silpa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	4.440.040.600,00	4.399.667.690,00	99,09		Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial	100 %	100 %	100%
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	14.855.000,00	14.614.200,00	98,38	Silpa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	2 Perkara	100%

	Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.425.185.600,00	4.385.053.490,00	99,09	DBH-CHT	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25.215 Orang	25.325 Orang	100,5%

Realisasi anggaran pada seluruh program dan kegiatan menunjukkan kinerja yang baik dan efektif. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 91,58%, mendukung peningkatan akuntabilitas dan tata kelola perangkat daerah dengan capaian output 100%. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi 71,53%, namun tetap mencapai target peningkatan produktivitas tenaga kerja. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial masing-masing terealisasi 99,03% dan 98,96%, dengan seluruh indikator output tercapai bahkan sebagian melampaui target. Secara keseluruhan, pelaksanaan program berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah.

3.4. Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya.

Tabel 3.8

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	(6-9)
					$(5/4) \times 100\%$			$(8/7) \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Hubungan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,3	76,72	105	6.456.223.000,00	4.617.885.212,00	72	33

Industrial	Tingkat Kesempatan Kerja	96,83	97,08	100	557.416.948,00	552.031.144,00	99	1
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	33,12	22,67	68	4.475.350.600,00	4.429.03.727,00	99	-31
	Meningkatnya disabilitas yg bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta	1,6	0,074	5	-	-	-	5
	Persentase disabilitas bekerja di perusahaan swasta	0,5	0,012	2,4	-	-	-	2,4
	Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Perangkat Daerah	0,5	0	0	6.513.210.050,00	5.965.17.741,00	91,58	-91,58

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra 2025–2029, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja yang inklusif, serta penguatan tata kelola perangkat daerah. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap capaian indikator kinerja, namun juga terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran guna memastikan keterkaitan antara belanja dan hasil. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan hubungan industrial menunjukkan efektivitas yang bervariasi.

Target TPAK sebesar 73,30% terealisasi sebesar 76,72% atau mencapai 105% dari target yang ditetapkan. Dari sisi anggaran, pagu sebesar Rp6.456.223.000,00 terealisasi Rp4.617.885.212,00 atau sebesar 72%. Dengan capaian kinerja melampaui target dan serapan anggaran yang relatif lebih rendah dari pagu, diperoleh tingkat efisiensi sebesar +33. Capaian ini mengindikasikan bahwa strategi pelatihan kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta penyebaran informasi pasar kerja telah memberikan kontribusi

nyata terhadap peningkatan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi.

Indikator Tingkat Kesempatan Kerja ditargetkan sebesar 96,83% dan terealisasi 97,08% atau 100% dari target. Anggaran sebesar Rp557.416.948,00 terealisasi Rp552.031.144,00 atau 99%. Tingkat efisiensi tercatat sebesar +1, yang menunjukkan keseimbangan antara capaian kinerja dan serapan anggaran. Hal ini menandakan bahwa perencanaan anggaran telah cukup proporsional terhadap kebutuhan program. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan capaian yang optimal.

Target sebesar 33,12% hanya terealisasi sebesar 22,67% atau 68% dari target. Sementara itu, anggaran sebesar Rp4.475.350.600,00 terealisasi Rp4.429.003.727,00 atau 99%. Tingkat efisiensi sebesar -31 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara besarnya anggaran yang terserap dengan capaian indikator kinerja. Hal tersebut disebabkan data yang kita terima adalah data keaktifan peserta bpjs ketenagakerjaan sedangkan data yang kita butuhkan dan indikator yang kita tetapkan adalah kepesertaan untuk selanjutnya akan kami diskusikan kembali dengan pihak bpjs.

Pada indikator Persentase Disabilitas Bekerja di Instansi Pemerintah, target 1,60% terealisasi 0,074% atau 5% dari target. Sementara pada perusahaan swasta, target 0,50% terealisasi 0,012% atau 2,4%. belum terdapat alokasi anggaran khusus yang secara langsung mendukung pencapaian indikator. Permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan data tenaga kerja disabilitas yang siap kerja, kurangnya pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta belum optimalnya implementasi kebijakan kuota tenaga kerja disabilitas. Selain itu, faktor sosial dan aksesibilitas lingkungan kerja juga menjadi tantangan.

Indikator Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP ditargetkan sebesar 0,50%, namun realisasi menunjukkan tidak adanya kenaikan (0%). Anggaran sebesar Rp6.513.210.050,00 terealisasi Rp5.965.117.741,00 atau 91,58%. Tingkat efisiensi tercatat sebesar -91,58 yang menunjukkan bahwa belanja yang dilakukan belum memberikan dampak terhadap peningkatan nilai akuntabilitas kinerja. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja belum sepenuhnya berjalan efektif. Diperlukan langkah perbaikan sistematis melalui penguatan manajemen kinerja, peningkatan

kapasitas SDM, serta penajaman indikator kinerja yang lebih terukur dan berdampak langsung terhadap peningkatan nilai evaluasi .

3.5. Inovasi

Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja memiliki inovasi yang bernama Sistem InforMasi satU daTa memBAngun PEluang keRja “SI IMUT BAPER”, namun inovasi tersebut mengalami kendala karena kita menggunakan system open souch dimana sangat rentan terhadap peretasan data. Pada tahun 2025 inovasi “SI IMUT BAPER” telah kami diskusikan agar bisa terlaksana dengan pihak ketiga sehingga inovasi yang telah di rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat untuk penyebaran informasi terkait ketenagakerjaan. Inovasi SI IMUT BAPER tidak dapat kami lanjutkan karena terkendala dengan Anggaran untuk merealisasikannya.

Sebagai langkah pengembangan kinerja di masa mendatang, kami telah merancang sebuah inovasi terbaru bernama ADINDA yang akan kami ajukan kepada Pemerintah guna mendukung peningkatan kinerja dinas tenaga kerja.



3.6. Penghargaan



Penghargaan ini kami terima sebagai apresiasi yang di berikan oleh badan pusat statistik kabupaten probolinggo atas organisasi perangkat daerah di pemerintah kabupaten probolinggo dengan pengiriman data responsif pertama dalam penyusunan publikasi kabupaten probolinggo dalam angka tahun 2025.



Tahun 2025 meraih 5 Besar Pemerintah Daerah terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur yang optimal dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

BAB. IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo menunjukkan capaian yang bervariasi antara indikator makro ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, inklusivitas, serta tata kelola pemerintahan. Dari sisi kondisi sumber daya manusia, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dengan jumlah pegawai yang tersedia. Kekurangan pegawai ini berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program, kualitas layanan, serta pencapaian indikator kinerja, khususnya pada jabatan fungsional teknis dan perencanaan.

Pada sasaran peningkatan produktivitas tenaga kerja dan hubungan industrial, indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja menunjukkan capaian sangat baik bahkan melampaui target, dengan tingkat efisiensi anggaran yang relatif positif. Hal ini mencerminkan bahwa program pelatihan, fasilitasi penempatan kerja, serta dukungan hubungan industrial berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, pada indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, capaian masih belum optimal meskipun anggaran hampir seluruhnya terserap. Hal tersebut disebabkan data yang kita terima adalah data keaktifan peserta bpjs ketenagakerjaan sedangkan data yang kita butuhkan dan indikator yang kita tetapkan adalah kepesertaan untuk selanjutnya akan kami diskusikan kembali dengan pihak bpjs.

Pada sasaran peningkatan tenaga kerja disabilitas di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, capaian indikator masih sangat rendah dan belum didukung oleh intervensi anggaran yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan, penguatan pelatihan berbasis kompetensi, serta peningkatan komitmen lintas sektor dalam mendorong lingkungan yang terbuka bagi semua orang tanpa diskriminasi tenaga kerja.

Sementara itu, pada aspek peningkatan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah, tidak adanya kenaikan nilai LHE AKIP meskipun realisasi anggaran

cukup tinggi mengindikasikan bahwa sistem manajemen kinerja belum berjalan optimal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan efisiensi anggaran, terdapat beberapa area yang perlu mendapatkan perhatian strategis guna meningkatkan efektivitas program dan akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo. Pertama, terkait perencanaan dan penganggaran, diperlukan penajaman indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, dan berbasis hasil. Setiap program dan kegiatan sebaiknya diselaraskan dengan sasaran strategis sehingga setiap rupiah anggaran memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian target.

Kedua untuk meningkatkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu dilakukan sinkronisasi dan validasi data antara indikator kepesertaan dan data keaktifan peserta. Sosialisasi intensif kepada perusahaan dan pekerja, terutama di sektor informal, harus ditingkatkan agar kepesertaan menjadi lebih luas. Penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi juga penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya.

Ketiga, pencapaian tenaga kerja disabilitas yang masih rendah menuntut kebijakan yang lebih terstruktur. Pengalokasian anggaran khusus untuk pelatihan berbasis kompetensi, pembangunan kemitraan dengan sektor swasta untuk penempatan kerja, serta pengembangan basis data tenaga kerja disabilitas yang terintegrasi menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan. Hal ini penting untuk meningkatkan peluang kerja yang adil bagi penyandang disabilitas.

Keempat, penguatan akuntabilitas dan peningkatan nilai AKIP memerlukan perhatian serius. Cascading kinerja hingga level individu perlu diperkuat agar selaras dengan sasaran strategis organisasi. Kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja harus lebih berfokus pada hasil dan dampak, sementara tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi sebelumnya perlu dilakukan secara konkret. Selain itu, kapasitas SDM perencana dan pengelola kinerja harus ditingkatkan melalui bimbingan teknis dan pendampingan, dan fungsi monitoring dan evaluasi internal harus dioptimalkan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan perbaikan.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan terukur, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara menyeluruh, baik dari sisi efektivitas program, efisiensi anggaran, maupun kualitas tata kelola.

Probolinggo, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

SANIWAR, S.Sos, M.Si

NIP. 19700323 199302 1 002

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan terukur, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara menyeluruh, baik dari sisi efektivitas program, efisiensi anggaran, maupun kualitas tata kelola.

Probolinggo, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO



SANJWAR, S.Sos, M.Si

NIP. 1960123 199302 1 002